

Agama Jalan Tengah

Otto Gusti*1

Media Indonesia, Selasa 19 Februari 2019

Editorial *Media Indonesia* dengan topik “Jalan Tengah Muhammadiyah” mengartikulasikan secara tepat relasi antara agama dan negara (MI, 15/02/19). Di tengah menguatnya praktik politik kebencian, intoleransi dan gelombang populisme kanan, agama harus tampil sebagai agen moral yang mencerahkan.

Agama yang mencerahkan adalah agama yang “cinta damai, cinta toleransi, cinta membangun, dan cinta persaudaraan” (MI, 15/02/19). Hal ini penting dalam merajut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa yang plural. Karena itu, tema Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Bengkulu beberapa waktu lalu yakni “Beragama yang Mencerahkan” sangat tepat.

Pencerahan

Tema Tanwir Muhammadiyah mengingatkan kita akan tradisi pencerahan dalam diskursus filsafat. Dalam tradisi filsafat barat, pencerahan atau *Aufklaerung* diartikan sebagai “Ausgang der Menschheit aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit” – “Keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri” (Bdk. Immanuel Kant, 1784).

Ketidakdewasaan itu berakar dalam ketidakmampuan manusia untuk menggunakan akal budinya dan hidup di bawah tuntunan cahaya akal budi atau rasionalitas. Karena itu Immanuel Kant (1724-1804), salah seorang filsuf Jerman modern terbesar, menyerukan “sapere aude” atau “beranilah menggunakan akal sehat” sebagai semboyan masyarakat modern.

Awasan Immanuel Kant di atas relevan untuk konteks kita sekarang. Pembusukan akal sehat sedang meracuni kehidupan bangsa Indonesia termasuk kehidupan beragama. Hal ini ditunjukkan lewat fenomena menguatnya radikalisme dan kekerasan atas nama agama, kapitalisasi identitas agama untuk kepentingan politik elektoral dan lenyapnya budaya kejujuran ditelan wabah *fake news* dan *hoaks* di media sosial (Bdk. Ari Susanto, Kompas, 18/02/2019).

Resep agama “jalan tengah” yang ditawarkan Muhammadiyah merupakan jalan pencerahan dan solusi dalam merumuskan peran publik agama serta menata kembali secara rasional hubungan antara agama dan politik di Indonesia.

Deliberasi rasional tentang hubungan antara agama dan negara bukan perkara baru dalam sejarah politik bangsa Indonesia. Pada awal berdirinya bangsa Indonesia para generasi pendiri sudah berdiskusi secara serius tentang peran agama dalam kehidupan publik.

Masih segar kiranya dalam memori kolektif bangsa ini polemik antara Soekarno dan Mohammad Natsir. Soekarno merupakan representasi dari kelompok nasionalis sekuler yang

memperjuangkan pemisahan tegas antara negara dan agama. Sedangkan Mohammad Natsir menyuarakan aspirasi golongan nasionalis islami yang menghendaki pertautan yang erat antara agama dan negara, sebab agama tidak hanya mengatur relasi antara manusia dan Tuhan, tapi juga manusia dan manusia dalam sebuah tatanan politik.

Dua Kubu

Tarikan antara dua kubu ini terus menggelora hingga dewasa ini. Dalam merumuskan peran publik agama terdapat dua posisi ekstrim yang harus dihindari. *Pertama*, kecenderungan privatisasi agama tanpa pertanggungjawaban sosial atau solidaritas sosial. Di sini agama dipandang sebagai ritualisme semata tanpa keterkaitan pada transformasi sosio-politik.

Pemahaman agama seperti ini adalah produk dari sekularisme yang menempatkan agama pada ruang privat irasional. Juergen Habermas berbicara tentang *Verdrängungsmodell* sebagai sebuah paradigma yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern agama akan lenyap dari ruang publik. Agama hanya bergerak di ruang privat dan posisinya di ruang publik akan digantikan oleh ilmu pengetahuan dan ideologi kemajuan masyarakat modern.

Dalam sejarah Indonesia tendensi privatisasi agama ditopang secara sistematis oleh sistem politik yang mengkriminalisasi setiap gerakan kiri dengan agenda keadilan sosial sebagai ideologi komunis atau marxisme. Tak perlu heran jika agama-agama di Indonesia sering gagal mengembangkan dimensi transformatif sosial imannya dan lebih sibuk dengan “ritualisme dan narsisme atas kelompoknya, sehingga seorang beragama yang pro-HAM, misalnya, dianggap ”sekularis” atau ”anti-agama” oleh komunitasnya” (F. Budi Hardiman, 2011).

Kedua, tendensi kolonialisasi ruang publik oleh agama. Relasi patologis antara agama dan akal budi ini oleh Juergen Habermas dinamakan *Enteignungsmodell*. Dalam terang paradigma ini segala produk sekularisasi dan modernitas dianggap sebagai karya setan dan musuh agama yang harus dihancurkan. Itulah keyakinan ideologis para pelaku teror bom bunuh diri yang ingin membangun kembali “moralitas” agama dengan jalan kekerasan.

Dominasi agama atau moralitas privat atas ruang publik secara kasat mata muncul dalam gerakan pengarusutamaan moralitas Islam konservatif dan menguatnya gerakan ultra-nasionalisme reaksioner sempit dalam diskursus dan praktik politik di Indonesia (Bdk. Vedi R. Hadiz, 2017). Dominasi moralitas agama berhaluan konservatif berdampak pada pengabaian hak-hak privat warga negara (hak-hak liberal), terutama kelas sosial yang paling rentan seperti kepek LGBT dan kelompok minoritas agama dan etnis.

Gerakan ultra-nasionalisme menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti penyelesaian kasus pembantaian massal tahun 1965. Atas dasar patriotisme sempit itu, para purnawirawan jenderal militer menentang usaha pengungkapan kembali kebenaran kasus tersebut. Bagi mereka, pembasmian PKI adalah basis legitimasi kekuasaan militer selama masa Orde Baru.

Jalan Tengah

Agama jalan tengah adalah sumber kekuatan transformatif untuk perwujudan keadilan dan kesejahteraan umum. Untuk itu agama-agama harus mengatasi patologi ritualisme tanpa pertanggungjawaban sosial dan tendensi terlibat di ruang publik tanpa taat pada prinsip pluralisme dan toleransi. Secara politis agama-agama harus mampu mengadvokasi hak-hak individual sekaligus berkomitmen untuk keadilan sosial sebagai pilar pembangunan masyarakat demokratis yang bermakna.

* Dosen Filsafat Politik dan HAM di STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT;
alumnus program doktoral di Hochschule für Philosophie, München, Jerman.